

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aisha Abdul Rahman Noor**, 2006, *Colonial Image of Malay Adat Laws, A Critical Appraisal of Studies on Adat Laws in the Malay Peninsula during the Colonial Era and Some Continuities*, The Netherlands Koninklijke Brill, Leiden.
- Ali, Zainuddin**, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arianto, Henry dan Lisasih, Nin Yasmine**, 2019, "Hukum Delik Adat", Kuliah Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Tahun 2019.
- Arif, Barda Nawawi**, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly**, 2015, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Briggs, Adrian**, 2002, *The Conflict of Laws*, Oxford University Press, United States, New York.
- Cotterrell, Roger**, 2008, *Living Law: Studies in Legal and Social Theory*, Routledge, USA.
- Dewi Wulansari, C**, 2012, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Erdianto**, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Faisal**, 2015, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keailan dan Tafsir*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Fathurokhman, Ferry**, 2022 *"Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana"*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuady, Munir**, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir**, 2013, *"Teori-Teori Besar dalam Hukum (grand theory) Edisi Pertama"* Kencana Prenada Medai Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman**, 2014 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana**, 2014, *"Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Klappstein, Verena and Dybowski, Maciej**, 2018, *“Ratio Legis Philosophical and Theoretical Perspectives”*, Springer International Publishing, Switzerland.
- Marzuki, Peter Mahmud**. 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno**, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, 2020, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S.** 2021 *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Montesquieu**, 2007, *“The Spirit of Laws: Dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu politik”*, Nusamedia, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung**, 2007, *“Arus Pemikiran Konstitusionalisme”*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Pandey, Prabhat and Mishra, Pandey Meenu**, 2015, *Research Methodology: Tools and Techniques*, Bridge Centre, Romania European Union.
- Rahardjo, Stjipto**, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Ronyy, Hanitijo Soetmir**, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- S. Maria Farida Indrati**, 2007 *“Ilmu Perundang-Undangan”*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sally, Simpson S**, 2005, *Corporate Crime, Law and Social Control*, Cambridge University Press, United States of America.
- Setiady, Tolib**, 2009 *“Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)”*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono**, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta.
- Van Rossum, Wibo and Bocker Anita**, 2009, *“Death and Resurrection Anthropology of Law, Introduction to the special issue,”* Reed Business, Amsterdam.
- Vel Jacqueline, et. Al**, 2022, *“Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia Teori, Petunjuk dan Praktek”*, Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Widnyana, I made**, 2013 *“Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana”*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerjo**, 1967, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Indonesia.

Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudiyat Iman, 1981 “*Hukum Adat Sketsa Adat*”, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah berubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Tesis/Disertasi

Rahman Fajar Septiawan Arif dan Sudjito, 2012, “Kajian Politik Hukum Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Wahyudi Gani Andika, Priyo Gunarto Marcus dan Hiariej Edward O.S, 2019, “Eksistensi Nilai Budaya Siri’ Na Pacce terhadap Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan asas legalitas pada Masyarakat Bugis Makassar” Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

D. Artikel Jurnal

Ade Sinta, “Eksistensi Lokika Sanggraha Sebagai Tindak Pidana adat Bali Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *De Juncto Delicti: Journal of Law* Volume 1, Nomor. 1, Agustus, Tahun 2021.

Agus Sudaryanto dan Sigid Riyanto, ‘eksistensi delik adat di lingkungan masyarakat Sentoloyo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta’, *Mimbar hukum, faculty of law, Universitas Gadjah Mada*, Volume 28 Nomor 1, Februari, Tahun 2016.

Royid, Nur, ‘review kritis geneologi konseptualisasi budaya dan telaah pengatuan kebijakan kebudayaan daerah di Indonesia’ *Putrawidya*, Volume 21, nomor 2, Agustus Tahun 2020.

- Airlangga, Shandi Patria**, “*Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*” Jurnal FH Unila, Volume 3, Nomor 1 Juni 2019.
- Sasmitha Jiwa Utama Tody**, ‘*hukum yang hidup*’ dalam *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara Akomodasi dan Negasi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49, Nomor 1, Tahun 2020.
- Alting Husen**, ‘Penguasaan tanah masyarakat hukum adat (suatu kajian terhadap masyarakat hukum adat ternate)’, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 1, Januari, Tahun 2011.
- David Tan**, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8, August, Tahun 2021.
- Diala, Anthony C**, ‘*The Concept of living customary law: a critique*’, The Journal of legal pluralism and unofficial law, Volume 49, Nomor 2, Tahun 2017.
- Doelen, FCJ van der, Vlis EJC van der and Justitieel Verkenningen**, “*De Rechtspraak en de vrije jurisdische beroepen: Meesters in eigenzinningheid*” The Hague, Vol 5 No 6, September 2007.
- Dwiatmodjo Haryanto**, “Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao”, Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 1, 2012.
- Dyka Nurcaesar and Muhammad Rusli Arafat**, “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat,” *Jurnal Justitia*, Volume 8, Nomor 4, April, Tahun 2021.
- Fuady Munir**, 2013, “*Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gunarto, Marcus Priyo**, “Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Mimbar Hukum Faculty of law, Universitas Gadjah Mada, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.
- H Mustaghfirin**, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni,” *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11, Nomor 1 Edisi Maret 2011.
- H.P. Wiratraman dan WD Putro**, ‘Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia’, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 31, Nomor 3, 2019.
- Hadi S.** “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 13, Agustus, Tahun 2017.

- Hairi P. J.** “Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia”, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 1, Nomor 7, Agustus Tahun 2017.
- Hedrik Mezak Meray**, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *law rivew*, volume V, Nomor 3, Maret, Tahun 2006.
- Jaya N. S. P.** “Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Volume 2, April Tahun 2016.
- Jiwa Utama, Tody Sasmitha dan Febri Aristya, Sandra Dini**, ‘*Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*’, *Mimbar Hukum*, Faculty of law, Universitas Gdjah Mada, Volume 27, Nomor 1, Tahun 2015.
- Jl Kamp Wolker**, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana adat” Volume 1, Nomor 1, November, 2016.
- Keebet von Benda-Beckmann and Bertram Turner**, “Legal Pluralism, Social Theory, and the State,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Volume 50, Nomor. 3, September, Tahun 2018.
- Lago Yuber, Gining Yuni Priskila Ginting and Sugianto Fajar**, ‘dilema keadilan hukum antara hukum tidak tertulis yang hidup (*Ongeschereven Recht*) dan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari aspek filosofis’ *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 1, Februari 2023.
- M. Jamil**, “Membaca Nafas Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,” *preprint, Open Science Framework*, Volume 12, Nomor 2, January, Tahun 2021.
- Murtir Jeddawi and Abdul Rahman**, “Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah” *Jurnal Konstituen* Volume 2, Nomor 2, Agustus, Tahun 2020.
- Nelken David**, “Law in Action or Living Law? Back to The Beginning in Sociology of Law”, *ProQuest*, Vol 4 Nomor 2, Juli 1984.
- Patricia Pasapan, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa**, “Tindak Pidana adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia” 2, Nomor. 2, Agustus, Tahun 2022.
- Ponzetto, Giacomo A.M. dan A. Fernandez Patricio**, “Case law Versus Statute Law: An Evolutionary Comparison”. *The Hournal of Legl Studies*, Volume 37, Nomor 2, Tahun 2008.

Ralf Michaels, “Global Legal Pluralism” *Annual Review of Law & Social Science* Volume 5, Nomor 28, Desember, Tahun 2009.

Reimon Supusesa, Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum’ *Mimbar Hukum*, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Volume 24, Nomor 1, 2012.

Rumadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum, dalam ha ini Menegakkan Keadilan dei terwujudnya perdamaian”, *Jurnal Rechtvindig*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Sartika Intaning Pradhani dan Almonika Cindy Fatika Sari, ‘Penerapan Pendekatan Positivistik dalam penelitian hukum adat’. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51 Nomor 3, Juli Tahun 2022.

Simanjuntak, Enrico, “The Roles of Case law in Indonesian Legal System” *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Sulastriyono and Sartika Intaning Pradhani, “Pemikiran Hukum Adat Djodigodigodeno dan Relevansinya Kini,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, Volume 30 Nomor 3, October, Tahun 2018.

Supriyadi, ‘Penetapan Tindak Pidana, sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus’, Volume 27, Nomor 3, tahun 2015.

Yance Arizona, ‘Adat as Strategy for Legal Struggle and Leal Mobilization/ adat sebagai startegi perjuangan dan mobilisasi hukum’, *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Volume 2 Nomor 2023.

E. Website Resmi

<https://kumparan.com/universitas-ahmad-dahlan/memahami-tentang-pidana-dan-pemidanaan-lzXsle1Wosg/fullad> diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2009/11/25/13451347/~Regional~Jawa#> diakses pada tanggal 15 Juli 2023

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-dilema-pemaknaan-asas-legalitas/> diakses tanggal 16 Juli 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tidak-jadi-melanggar-asas-legalitas-lt64191772e84de/?page=2> diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

Irianto, Sulistyowati, 2022, “*Living law* dalam Rancangan KUHP”, <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>, diakses Tanggal 2 Januari 2023.

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses di <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/11077-rkuhp-perlu-disahkan-untuk-jamin-kepastian-hukum> pada tanggal 15 Juli 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp> diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

Pengadilan Negeri Blora, lihat di <http://pn-blora.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 12 Juli 2023.

Penjelasan *Artificial Intelligence* yang dapat berpotensi menyelesaikan perosalan harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-artificial-intelligence-dalam-pembuatan-peraturan-lt607c22411436b/> diakses pada tanggal 5 September 2023, pukul 01:48 WIB.